

KAJIAN KETIMPANGAN PENDAPATAN EKONOMI KABUPATEN BONE

Misbahuddin*)
STIM LPI Makassar, Jl. Bung
(ketua LP2KUMKM)

Abstract: *The study of income inequality in the economy into a discussion of this study is that the level of inequality of income distribution in Bone regency shown as relatively high value of the gini ratio. There are differences in the level of inequality between districts. Takkalala the District is a district with the lowest levels of inequality Ulaweng while the District is a district with the highest level of inequality. Based on the results of statistical analysis, the level of public revenues, the most influential factor in the level of economic ketipangan district Bone is the level of education, the head of the family, number of dependents, and investment value.*

Keywords : *Income Economi*

Abstrak : *Kajian ketimpangan pendapatan ekonomi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah dimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bone tergolong relatif tinggi yang ditunjukkan dari nilai gini ratio. Ada perbedaan tingkat ketimpangan antar kecamatan. Kecamatan Takkalala merupakan kecamatan dengan tingkat ketimpangan paling rendah sementara Kecamatan Ulaweng merupakan kecamatan dengan tingkat ketimpangan paling tinggi. Berdasarkan hasil analisis secara statistik, tingkat pendapatan masyarakat maka faktor yang paling berpengaruh dalam tingkat ketipangan ekonomi kabupaten Bone yaitu tingkat pendidikan, kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, dan nilai investasi.*

Kata Kunci : *Pendapatan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan di daerah secara umum adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Wujud dari pembangunan diantaranya meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan penerapan hukum yang berkeadilan. Di antara aspek-aspek tersebut, pembangunan ekonomi merupakan aspek yang paling esensial dalam menunjang pembangunan di daerah.

Pemmasalahan pembangunan ekonomi daerah dan bangsa sampai saat ini masih berfokus pada soal ketimpangan dan kesenjangan antara wilayah, antara pendapatan, dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan dibutuhkan, tetapi tidak cukup dengan itu, melainkan dibarengi dengan peningkatan pendapatan

perkapita dengan disparitas daya beli yang dapat menjangkau kebutuhan dasar masyarakatnya. Jika suatu negara yang mengalami pertumbuhan tanpa dibarengi dengan pemerataan, maka tentu akan berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan penduduk pada satu sisi dan pada sisilain akan menghambat pertumbuhan yang telah ditargetkan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Kondisi lain yang memungkinkan terjadi ketika terjadi ketimpangan antara wilayah dan sektor-sektor lapangan uaha juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi hanya berada pada wilayah tertentu dan sektor tertentu, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan yang tidak diikuti dengan penguatan struktur ekonomi yang tidak seimban, baik dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya maupun

kontribusinya terhadap penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain faktor pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu, kesenjangan pendapatan masyarakat juga diakibatkan oleh persoalan struktural yang terjadi dalam perekonomian, persoalan struktural tersebut antara lain akses yang tidak sama terhadap teknologi, kepemilikan modal, pendidikan, kesehatan maupun input produktif lainnya.

Dengan demikian maka pembangunan yang hanya memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi saja, ternyata menimbulkan masalah yang tidak kecil artinya bagi pembangunan di daerah. Walaupun sasaran ini telah dapat dicapai, namun laju pertumbuhan ekonomi belum mampu menyelesaikan masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa terdapatnya pola pembagian pendapatan yang lebih merata, pada dasarnya akan lebih menguntungkan golongan penduduk berpendapatan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan rendah karena tidak terjadinya perembesan pembangunan ke golongan masyarakat berpendapatan rendah (efek *trickle down*).

Pola pembagian pendapatan yang lebih merata, dapat dianggap lebih mampu berperan selaku indikator tingkat kemakmuran penduduk sebaliknya pola pembagian pendapatan yang merata, tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih tepat disebut pemerataan kemiskinan dibandingkan dengan pemerataan kemakmuran.

Dengan gambaran keadaan yang bertolak belakang inilah kemudian menjadi pendorong pentingnya dibahas dalam focus penelitian ini melalui pendekatan teori, konsep dan pendekatan empirik serta implikasi kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan ekonomi masyarakat dan dampaknya terhadap variable-variabel ekonomi lainnya serta mendapatkan hasil kajian

factor yang paling berpengaruh yang menyebabkan ketimpangan ekonomi masyarakat kabupaten Bone.

Permasalahan

Berbasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan utama yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah : “

1. Bagaimana kondisi Pendapatan ekonomi masyarakat dan faktor-faktor apa penyebab ketimpangan pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone.
2. Dari berbagai factor penyebab ketimpangan pendapatan ekonomi tersebut factor apa yang paling berpengaruh.

Tujuan kajian

1. Untuk mengetahui kondisi Pendapatan ekonomi masyarakat dan faktor penyebab terjadinya ketimpangan di kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui factor yang paling berpengaruh penyebab ketimpangan pendapatan ekonomi di Kabupaten Bone.

Output

Berdasarkan rumusan masalah utama serta tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini, maka hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut : Terdapatnya rumusan yang termuan dalam dokumen tentang faktor –faktor penyebab ketimbangan, dan terdapat rumusan dan acuan yang efektif mengatasi secara ilmiah.

Ruanglingkup Kajian

Kajian ini mencakup beberapa aspek yang terkait :

- a. Kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap Penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.
- b. Ketimpangan pendapatan ekonomi masyarakat kabupaten Bone

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Pengertian dan Konsep Pembangunan dan Ketimpngan Ekonomi

Konsep pembangunan didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Sukirno (1985) mengemukakan bahwa walaupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang di jalankan oleh sesuatu masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan pembatasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Secara spesifik Jhingan (2007) mengemukakan perkembangan ekonomi dalam tiga cara. Pertama, perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Kedua, berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Ketiga, ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik tilik kesejahteraan.

Dari dua pandangan tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pembangunan ekonomi dicirikan oleh: 1) suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus, 2) usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional, dan 3) kenaikan pendapatan itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan

struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda

Pada dasarnya transformasi negara-negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri . Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui pendapatan perkapita (Chenery 1986)

Dari gambaran perspektif yang telah dikemukakan di atas, maka jelas kiranya jika pembangunan pada intinya dimaksudkan sebagai upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi yang dilakukan secara terencana untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti pembangunan tersebut melibatkan pelaku, terdapat proses di dalamnya serta arah yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Pengukuran Indikator Pembangunan

Penggunaan indikator pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang tergolong miskin, indikator pembangunannya tentu berbeda dengan indikator pembangunan di Negara-negara maju. Pada Negara-negara miskin ukuran pembangunannya masih sekitar kebutuhan dasar seperti listrik, layanan kesehatan, dan kebutuhan makanan.

Pada Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas, indikator pembangunannya menurut Tikson (2005) akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier, seperti : 1) pertumbuhan ekonomi yang

mendorong pemerataan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup, 2) menguatkan ekonomi nasional/domestic yang dapat memperluas lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat terus meningkat baik terhadap barang local maupun impor, 3) diversifikasi kegiatan/sector ekonomi dengan penguatan sector industry dan jasa disertai dengan keseimbangan antara produksi barang ekspor dan impor, 4) partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan proses pembuatan keputusan, 5) tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua lapisan penguatan hak-hak asasi manusia.

Pengukuran Indikator pembangunan dalam pandangan Todaro (1983) dikemukakannya mencakup :1) tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, 2) tingkat pertumbuhan produktivitas, 3) tingkat transformasi struktur ekonomi, 4) tingkat transformasi social politik dan ideologi, yaitu perubahan dan pemantapan sistem sosial, politik, dan ideologi nasional, dan 5) jangkauan ekonomi internasional, yaitu sejauhmana pengaruh ekonomi nasional Negara yang bersangkutan terhadap ekonomi internasional.

Pengertian dan Konsep Ketimpangan.

Berkaitan dengan definisi pembangunan yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, maka kajian ini lebih menekankan pada peningkatan pendapatan perkapita dimana negara berupaya meningkatkan outputnya melebihi dari tingkat pendudu suatu negara. Dalam perspektif daerah, Lincolin Arsyad : 1999) dan Blekely E.j (1989) mengungkapkan bahwa pembagunan daerah suatu proses dimana pemerintah daerah dan komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menempatkan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Kerangka Konseptual.

Todaro (2006) memberi contoh ketimpangan pendapatan di Brasil antara lain disebabkan oleh soal kepemilikan tanah dan asset lainnya telah menempatkan Brasil dalam pringkat terburuk di dunia. Selama beberapa decade. Tingkat ketimpangan pendapatan Brasil tercermin dalam rendahnya jumlah pendapatan dari 60 % penduduk termiskin dan 10 % penduduk terkaya menerima pendapatan lebih dari setengah pendapatan nasional, sementara 40 % penduduk termiskin hanya menerima 7%. Lebih lanjut diungkapkan bahwa penyebab ketimpangan disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak disertai oleh pembangunan sosial, kepemilikan tanah, keseimbangan lingkungan tidak seimbang secara ekologi,

Konsep pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, dan beberapa indikator mengungkap ketimpangan dalam proses pembangunan, menempatkan ketimpangan pendapatan ekonomi masyarakat dalam kajian ini menjadi bagian penting. Urgensinya terletak pada upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan dalam percepatan pembangunan, namun upaya untuk mengatasi masalah-masalah ketimpangan yang dapat diukur dari beberapa faktor, baik dilihat dari aspek variable ekonominya maupun non ekonomi. Dari aspek variabel ekonominya tentu saja diawali dari posisi relative wilayah kajian, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, serta distribusi pendapatan antara wilayah.

Melalui pendekatan analisis yang digunakan dalam kajian ini akan diketahui posisi relative dan kondisi sektor ekonomi yang ada, serta ketimpangan yang tinggi, sedang dan rendah menjadi dasar di dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan yang efektif sebagai wujud intervensi pemerintah didalam menyikapi ketimpangan yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi serta kebijakan yang dianutnya dalam tahapan

pembangunan yang telah disepakati dalam kurun waktu perencanaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Kajian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dilaksanakan selama empat bulan, mulai awal bulan April sampai dengan akhir bulan Juli 2014.

Metode Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menjelaskan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan melalui survey. Selain itu juga menggunakan pendekatan FGD secara internal pada lingkup Kantor SKPD Badan, UPTD dan Lembaga Kajian serta NGO di lokasi penelitian di kabupaten Bone.

Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini populasinya adalah penduduk yang berada di lokasi kecamatan yang dipilih sesuai dengan persyaratan, dengan mengambil sampel secara purposive yakni ditentukan jumlahnya untuk masing-masing kecamatan yang dijadikan sampel. Dengan narasumber yang berasal dari pejabat struktural serta nara sumber yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian terutama yang bersumber dari pemerintah daerah. Sedangkan data primer diperoleh dari penduduk setempat sesuai dengan kecamatan dan sampel yang telah ditentukan dimana terlebih dahulu disiapkan kuisioner.

Metode dan Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini menggunakan metode dan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Analisis Gini Ratio (GRS)

Analisis ini digunakan untuk melihat ketimpangan yang terjadi atas pendapatan yang dimiliki oleh kelompok tertentu

2. Analisis Statistik

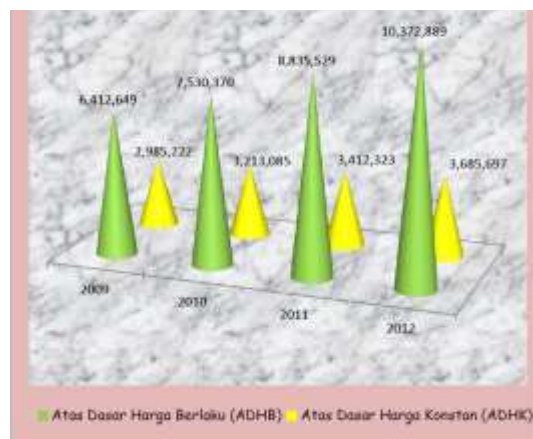
Melalui analisis ini berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

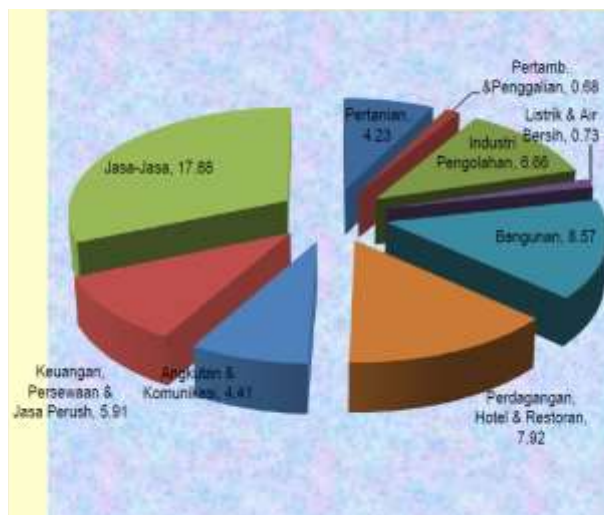
Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah itu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, berbagai kebijakan, langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Semua kebijakan dan upaya pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 telah mencapai 10.372.888,85 milyar rupiah. Jika dibanding dengan nilai PDRB tahun 2011 sebesar 8.835.528,87 milyar rupiah maka terjadi kenaikan sebesar 17,40 persen.



Salah satu manfaat hasil perhitungan PDRB yaitu dapat digunakan untuk melihat gambaran struktur perekonomian suatu daerah/wilayah. Struktur perekonomian Kabupaten Bone masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB tahun 2012 sebesar 47,23 persen, urutan kedua sektor jasa-jasa sebesar 17,88 persen disusul sektor bangunan 8,57 persen dan sektor perdagangan, restoran dan hotel 7,92 persen dan sektor lainnya sebesar 18,40 persen.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai tahun 2012 telah berkembang sangat cepat. Pada tahun 2009 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bone hanya mencapai Rp 9.009.719 dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi Rp 14.234.064



Kondisi Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Bone pada kurun waktu Tahun 2009 – 2011 tampaknya tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan Sektor Pertanian terhadap perekonomian daerah ini masih mendominasi yakni rata-rata hampir 47,27 persen.

Tabel 1
Kontribusi PDRB Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Bone
Tahun 2011 – 2013

SEKTOR	2011	2012	2013	RATA2
1. PERTANIAN	47,72	48,16	45,92	47,27
2. PERTAMBANGAN dan PENGALIAN	0,67	0,70	0,71	0,69
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,84	6,79	6,64	6,76
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	0,71	0,75	0,75	0,74
5. BANGUNAN	8,20	8,73	9,04	8,66
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	7,70	6,11	7,93	7,24
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,48	4,50	4,46	4,48
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHA	5,60	6,03	6,63	6,09
9. JASA - JASA	18,07	18,23	17,92	18,08
	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Bone Dalam Angka 2014

Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bone masih mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomiannya. Sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap struktur perekonomian Kabupaten Bone sampai tahun 2013 adalah sektor Bangunan

dengan kontribusi sekitar 8,66 persen per tahun, kemudian sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 17,48 persen, dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 7,24 persen.

Kondisi Tingkat Kemiskinan

Hasil perhitungan gini ratio dalam kajian ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Taneteriattang termasuk kategori tinggi karena nilainya sebesar 0,59 atau 0,60. Dari proporsi pendapatan dapat juga dilihat bahwa 40% golongan berpendapatan rendah hanya membagi total pendapatan sebesar 16,30%, sementara 40% golongan berpendapatan menengah memperoleh share 33,57% total pendapatan dan 20% golongan berpendapatan tinggi memperoleh 50,12% total pendapatan. Hal ini sesungguhnya memberikan makna bahwa lebih dari seperdua pendapatan di wilayah Kecamatan Taneteriattang diperoleh kelompok berpenghasilan tinggi yang jumlahnya 20% sedangkan 80% kelompok masyarakat lainnya hanya membagi 49,88% pendapatan, bahkan 20% penduduk kategori sangat

miskin hanya memperoleh pendapatan 6,69%.

Berdasarkan data analisis dapat diketahui bahwa ada proporsi yang sangat timpang/ketimpangan tinggi antara golongan pendapatan di Kecamatan Taneteriattang Timur. Secara umum tingkat pendapatan masyarakat di wilayah ini memang jauh lebih tinggi dibanding Kecamatan Taneteriattang tetapi tingkat ketimpangannya juga semakin tinggi atau lebih buruk dibanding Kecamatan Taneteriattang. Di wilayah ini, 20% golongan berpendapatan rendah hanya menerima 5,04% total pendapatan sementara 20% golongan berpendapatan tinggi memperoleh share 54,89% dari total pendapatan. Angka gini ratio juga memperlihatkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang berada pada kategori tinggi yaitu 0,62.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Gini Ratio Untuk Kecamatan Ulaweng

Golongan Pendapatan	Pendapatan Dalam Kelas			Proporsi Kumulatif		Gini Ratio
	Jumlah	Rasio	%	%	Rasio	
20% terendah	4.900.000	0,0790	7,90	7,90	0,0790	0,0158
20% kedua	8.550.000	0,1379	13,79	21,69	0,2169	0,0434
20% ketiga	9.000.000	0,1452	14,52	36,21	0,3621	0,0724
20% keempat	13.050.000	0,2105	21,05	57,26	0,5726	0,1145
20% teratas	26.500.000	0,4274	42,74	100,00	1,0000	0,2000
Jumlah	62.000.000		100,00			0,4461
Gini Ratio						0,5539

Sumber: Data primer setelah diolah, 2014

Dari table 2 diatas dapat diketahui bahwa ada proporsi yang sangat timpang antara golongan pendapatan di Kecamatan Ulaweng. Secara umum akumulasi pendapatan masyarakat di wilayah ini memang jauh lebih rendah dibanding Kecamatan Taneteriattang dan Taneteriattang Timur tetapi lebih distribusinya lebih baik dibanding dua kecamatan dimaksud. Hal ini artinya rendahnya tingkat pendapatan lebih merata atau terdistribusi lebih baik. Di wilayah ini, 40% golongan berpendapatan

rendah hanya menerima 21,69% total pendapatan sementara 20% golongan berpendapatan tinggi memperoleh share 42,74% dari total pendapatan.

Berdasarkan data olahan dapat diketahui bahwa ada proporsi yang relatif timpang antara golongan pendapatan di Kecamatan Mare. Secara umum tingkat pendapatan masyarakat di wilayah ini memang lebih rendah dibanding tiga Kecamatan yang disebut sebelumnya, demikian halnya tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah ini termasuk kategori tinggi, namun lebih rendah dibanding kecamatan Taneteriattang dan Kecamatan Taneteriattang Timur. Di wilayah ini, 40% golongan berpendapatan rendah hanya menerima 19,63% total pendapatan sementara 20% golongan berpendapatan tinggi memperoleh share 35,39% dari total pendapatan.

Berdasarkan data-data dan kondisi tersebut di atas dapat dibuatkan pengelompokan dan pemetaan tentang tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bone, sementara jika dikaitkan dengan kriteria kemiskinan menurut Bank Dunia yang membagi penduduk berdasarkan tiga kategori pendapatan dapat dilihat melalui tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3
Pengelompokan Kelompok Pendapatan dan Gini Ratio
Tiap Kecamatan di Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	40% Klp Rendah	40% Klp Menengah	20% Klp Tinggi	Gini Ratio	Kemerataan
1	Taneteriattang	0,1630	0,3357	0,5012	0,5923	II
2	T.Riattang Timur	0,1398	0,3113	0,5489	0,6196	I
3	Ulaweng	0,2169	0,3556	0,4274	0,5539	III
4	Mare	0,1963	0,4497	0,3539	0,5399	IV

Sumber: Data primer setelah diolah

Hasil pengelompokan tingkat pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk tiap kecamatan di Kabupaten Bone seperti dipaparkan pada tabel di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bone relatif masih tinggi. Hasil analisis membuktikan bahwa daerah-daerah yang kelihatannya maju kegiatan ekonominya memberikan peluang terjadinya tingkat ketimpangan yang juga semakin lebar antara kelompok miskin dengan kelompok kaya, sementara daerah-daerah yang tingkat ketimpangannya rendah menunjukkan bahwa proporsi pendapatan kelompok menengah lebih mendominasi dibanding kelompok kaya.

Seperti tergambar pada tabel di atas, tingkat ketimpangan paling rendah terdapat di Kecamatan Mare yang terlihat dari nilai gini ratio paling rendah di antara 4 Kecamatan di Kabupaten Bone.

Berdasarkan analisa kriteria Bank Dunia yang membagi ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan golongan pendapatan penduduk, maka Kabupaten

Bone dikategorikan dalam ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi ($>17\%$). Hal ini ditunjukan dengan pendapatan yang dikuasai 40% penduduk yang berpenghasilan rendah adalah sebesar 24,89% dari total populasi pendapatan penduduk di Kabupaten Bone. Proporsi distribusi pendapatan terbesar untuk Kabupaten Bone dikuasai oleh kelompok kaya yaitu 40,56%.

Faktor-faktor Yang Paling Berpengaruh Dalam Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

Dalam teori ilmu ekonomi ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pendapatan dalam suatu wilayah, diantaranya adalah pola pengeluaran konsumsi, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan pola investasi.

Guna untuk melakukan pengujian beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab/paling berpengaruh kemiskinan maka digunakan alat analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari responden penelitian. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Output		
	Koef.	Prob	Ket
Konstanta	4.6472	0.0000	
Tkeluarga (X1)	-0.2208	0.0000	Signifikan
Pendidikan (X2)	0.1203	0.0362	Signifikan
Investasi (X3)	1.1085	0.0000	Signifikan
	R =	0.8630	
	R ² =	0.6920	
	Prob. F =	0.000	

Sumber: Output Perhitungan SPSS, 2014

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi untuk dua wilayah studi sebagai berikut:

$$Y_{\text{Bone}} = 4,6472 - 0,2308 X_1 + 0,1203 X_2 + 1,1085 X_3$$

Persamaan regresi tersebut memberi makna bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat mengikuti pola pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi. Tingginya pengeluaran konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan akibat menurunnya sisa pendapatan untuk saving atau untuk investasi. Hubungan antara tanggungan keluarga (X1) dengan tingkat pendapatan (Y) adalah negatif signifikan dengan nilai koefisien 0,2308 dan probabilitas 0,000. Sedangkan untuk variabel pendidikan memiliki hubungan yang positif signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,1203 dan probabilitas 0,0361. Demikian pula variabel investasi (X3) juga memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat dengan nilai koefisien regresi 1,1085 dan probabilitas 0,000.

Pola hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dari nilai R (Korelasi) sebesar 0,8550 yang bermakna bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan tingkat pendapatan masyarakat sangat kuat. Artinya, tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone ditentukan oleh besarnya tanggungan keluarga, tingkat

pendidikan kepala keluarga, dan kemampuan untuk melakukan investasi atau menabung. Tingkat determinasi ketiga variabel independen terhadap variabel dependen adalah 74,10% yang berarti sebesar 74,10% tingkat pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan investasi.

PENUTUP

Bila dilihat dari sektor basis dan non basis, hanya terdapat dua sektor yang secara konsisten bertahan sebagai sektor basis di Kabupaten Bone, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kemudian sektor jasa-jasa pernah menjadi sektor basis di tahun 2009 sampai 2010, akan tetapi pada tahun 2011 tidak lagi menjadi sektor basis.

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bone tergolong relatif tinggi yang ditunjukkan dari nilai gini ratio. Ada perbedaan tingkat ketimpangan antar kecamatan. Kecamatan Takkalala merupakan kecamatan dengan tingkat ketimpangan paling rendah sementara Kecamatan Ulaweng merupakan kecamatan dengan tingkat ketimpangan paling tinggi.

Berdasarkan hasil analisis secara statistik, tingkat pendapatan masyarakat maka faktor yang paling berpengaruh dalam tingkat ketipangan ekonomi kabupaten Bone yaitu tingkat pendidikan, kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, dan nilai investasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Dunia, 2007, Mengurangi Kemiskinan, Indonesian Expanding Horizons, Jakarta.
- Bappeda Kab. Bone, 2010, Kabupaten Bone Dalam Angka, BPS Kab.Bone.
- Bappeda Kab. Bone, 2011, Kabupaten Bone Dalam Angka, BPS Kab.Bone.
- Bappeda Kab. Bone, 2012, Kabupaten Bone Dalam Angka, BPS Kab.Bone.
- Bappeda Kab. Bone, 2013, Kabupaten Bone Dalam Angka, BPS Kab.Bone.
- Brahmbatt, Milan, 2006, Kemiskinan di Indonesia Belum Terentaskan, Republika Online, Jakarta.
- Brannen, Julia, 1999, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chenery, Hollis and, T.N. Srinivasan , 1989 *Hand book Development Economic*, Nort Holland Amesterdam New York Oxfood Tokyo.
- Dewanta, Awan Setya, (Ed), 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia ICMI Orwil DIY, Yogyakarta.
- Erani, Yustika Ahmad,, 2003, Negara Versus Kaum Miskin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Esmara, Hendra, 1986, Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- <http://web.worldbank.org/>, 2007, Kemiskinan, Wikipedia Bahasa Indonesia, eksiklopedia bebas.
- Jhingan, M.L, 2007, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1995, Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2004, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2000, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yogyakarta.
- Lemer, Daniel, 1978, Teknologi, Komunikasi dan Pembangunan, dalam Eduard Depari dan Colin Mc Andrew, eds, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Bina Aksara, Jakarta.
- Misbahuddin dan Hasan Iqbal M, 2013, “ Metode Anaalisis data Penelitian dengan Statisti, CV. Alpabetha. Jakarta.
- Moelyono Mauled .2010, Menggerakkan Ekonomi Kreatif (Antara tuntutan dan Kebutuhan), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Salim, Ishar Salim, Sallatang Arifin, dan Fattah Sanusi, 2007, Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Pokok Penyebab Kemiskinan Kelompok Etnis Tioanghoa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat, Universitas Tanjung Pura, Pontianak dan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Siagian, Sondang. P, 2008, Administrasi Pembangunan : Konsep, dimensi, dan strateginya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudono, Sakimo, 1985, Ekonomi Pembangunan : proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, (1986) Kuasa dan Moral, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tikson, Deddy. T, (2005), Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand, Ininnawa, Makassar.
- Todaro, Michael, (1983), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta